



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
(POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: RDP
Dengan	: 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Negara BUMN RI; 2. Direktur PPPH Kemenakertrans RI; 3. Direktur Utama PT. Industri Sandang Nusantara; 4. Perwakilan karyawan PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran.
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Juni 2011
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Melanjutkan rapat tanggal 16 Juni 2011 Membahas masalah mantan Karyawan PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran.
Ketua Rapat	: Ir. Abdul Aziz Suseno, MT/Ketua Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 5 orang dari 23 Anggota Panja Nakertrans Komisi IX DPR RI 1 orang izin.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI dengan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Negara BUMN RI, Direktur PPPHI Kemenakertrans RI, Direktur Utama PT. Industri Sandang Nusantara dan Perwakilan karyawan PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran dibuka pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemeneg BUMN menyampaikan penjelasan :  
Memperhatikan permasalahan yang terjadi, Kemeneg BUMN secepatnya akan mencari solusi selain mengupayakan proses pelelangan aset.  
Kemeneg BUMN masih menunggu proses penjualan aset yang harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan agar tidak menimbulkan masalah baru.  
Kemeneg BUMN juga tetap membantu memproses upaya pencarian dana yang dilakukan oleh Direksi melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan segera menyampaikan permasalahannya kepada Menteri Negara BUMN.
2. Direksi PT. Industri Sandang Nusantara unit Patal Banjarn telah berupaya melakukan negosiasi dengan pihak Perusahaan Pengelola Aset (PPA) agar manajemen mendapat dana talangan. Namun disini lain PPA juga terkendala oleh aturan yang mereka jalankan.
3. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Kemeneg BUMN dapat segera mengupayakan penyelesaian permasalahan dengan melibatkan Lembaga Perbankan seperti Bank Mandiri.
4. Kemeneg BUMN diminta segera melakukan koordinasi dengan Direksi dan Karyawan PT. Industri Sandang Nusantara unit Patal Banjarn, dengan harapan dalam waktu satu minggu diperoleh langkah konkret untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang belum diselesaikan.


## **III. KESIMPULAN**

1. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI meminta kejelasan waktu yang dibutuhkan oleh Deputi Meneg BUMN dan Direksi PT. Industri Sandang Nusantara guna memberi kepastian pembayaran pesangon kepada karyawan.
2. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI meminta kepada Deputi Meneg BUMN dan Direksi PT. Industri Sandang untuk mengagendakan kembali pembahasan mengenai solusi yang ditempuh terhadap mekanisme penjualan aset perusahaan, serta meminta kepada Deputi Meneg BUMN untuk mendorong dan mengkoordinasikan proses pencarian dana talangan yang sedang diupayakan oleh PT. Industri Sandang Nusantara kepada PPA (Perusahaan Pengelola Aset).
3. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI akan terus memantau dan akan menyampaikan hasil rapat ini kepada Pimpinan Komisi untuk disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Meneg BUMN.

4. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI memberikan waktu selama satu minggu kepada Kementerian BUMN agar dapat membawa hasil rapat koordinasi untuk dapat disampaikan dalam RDPU minggu depan.

**Rapat diakhiri pukul 12.30 WIB.**

PIMPINAN POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI  
Ketua,



**Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT**